

Kekuatan Sosial Berkait Sengketa Sriwedari

Dimuat Suara Merdeka, Senin, 28 September 2015

Oleh: Heri Priyatmoko SS MA

Dosen Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma

Kasus sengketa Taman Sriwedari Surakarta makin rumit. Dan, Pengadilan Negeri Surakarta telah melayangkan sepucuk surat kepada pimpinan Museum Radya Pustaka untuk mengosongkan seluruh koleksi delapan hari setelah tanggal 25 September 2015. Bagi masyarakat setempat dan Pemerintah Kota Solo, kabar tersebut laksana petir yang menyambar di siang hari dan cukup memekakkan telinga.

Sengketa Taman Sriwedari sangat dirasakan oleh ribuan warga yang saat ini memanfaatkan lahan peninggalan Keraton Surakarta itu. Warga yang sejak puluhan tahun membuka usaha dan *ngupaya upa* (mengais rezeki) di area ini waswas akan nasib mereka selanjutnya jika taman tersebut benar-benar dieksekusi.

Dalam konflik kepemilikan tanah yang berlangsung puluhan tahun antara ahli waris KRMH Wiryodiningrat dengan Pemkot Solo tersebut, penting mengidentifikasi serta menakar kekuatan sosial yang bertemali dengan ruang publik yang berdiri pada era Paku Buwono X (1893-1939) itu. Lantas, siapa kekuatan sosial dan apa yang bisa mereka kerjakan guna menyelamatkan taman kebanggaan *wong* Solo ini?

Mereka adalah orang-orang yang secara fakta sosial ikut *handarbeni* (memiliki) taman lantaran ada kepentingan baik bersifat kultural maupun ekonomi. Pertama, komunitas pecinta wayang orang. Mereka rata-rata berumur sepuh, dan memahami gedung wayang wong sebagai ruang penghilang stres sekaligus merawat ingatan sejarah kemasyuran kesenian tradisional. Golongan sepuh apabila *ngobrol* era keemasan wayang orang Sriwedari tahun 1950-an, pasti akan menyebut nama Darsi Pudyarini yang memerankan tokoh Srikandi, dan Rusman Harjawibaksa memerankan Gatotkaca, serta Surana Ranawibaksa pemeran Petruk. Ketiga pemain ini sukses melambungkan nama wayang wong, dan melejitkan nama Taman Sriwedari ke level nasional.

Kedua, kelompok penyuka tembang kenangan, lagu keroncong dan campursari, dan pecinta musik dangdut. Hiburan yang digelar di taman yang berada di tengah Kota Bengawan itu laksana obat rasa penak akibat setumpuk pekerjaan dan krisis ekonomi kian menerpa. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib komunitas ini jika gelaran musik itu dihapus lantaran harus dikosongkan. Para pemain musik yang menempatkan Sriwedari sebagai ajang latihan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup tentunya juga terganggu.

Ketiga, kelompok budayawan dan pemerhati seni yang “bergerombol” dan sering menggelar kegiatan kebudayaan di Museum Radya Pustaka. Suasana Kebon Raja yang sarat nilai sejarah dihidupkan dan roh kebudayaan dibangkitkan berkat adanya perhatian dari kelompok ini. Kerja kebudayaan mereka sulit diremehkan manakala kampus kurang menyediakan ruang diskusi perihal kebudayaan untuk dikonsumsi oleh komunitas non akademis.

Keempat, dari kepentingan ekonomi, lahir Forum Komunikasi Sriwedari (Foksri) yang diisi oleh 370 pedagang di kawasan Sriwedari dan ditambah pula para abang becak yang sudah lama mangkal di kompleks taman itu.

Bila sudi menghitung berapa jumlah orang dari sekian banyak komunitas, jumlah mereka mencapai jutaan jiwa. Pasalnya, sedari dulu Taman Sriwedari bukan hanya warga Solo yang merasa memilikinya, namun juga mereka yang berasal luar Kota Bengawan, seperti Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Boyolali dan Karanganyar. Pemikiran cerdas Paku

Buwono X yang masih bisa kita rasakan yaitu Kebon Raja memang dibikin untuk ajang saling kenal, tempat menyatukan rakyat dari berbagai lapisan sosial.

Nah, kekuatan sosial ini dapat melahirkan empati (action), setingkat lebih maju dari sekadar simpati (rasa keprihatinan). Mereka membangun opini publik untuk turut serta mempertahankan Taman Sriwedari agar tetap digunakan untuk kepentingan publik. Sebab, menurut Erwin Arianto (2009), kekuatan opini publik dalam ranah hukum adalah sebuah kekuatan baru sebagai penyeimbang dari adanya kekuatan uang dan kekuasaan yang selama ini dengan mudah dapat mengintervensi sebuah keputusan hukum.

PN Surakarta, dan pihak yang memenangkan kasus sengketa tanah ini kudu mereken kekuatan sosial tersebut. Publik menghendaki *public space* ini tetap dikelola negara, tak mau kawasan budaya itu tercabik-cabik dan disulap menjadi area bisnis. Kalau saja ahli waris dan PN Surakarta nekat melakukan eksekusi tanpa menggubris suara berbagai komunitas di atas, maka dampaknya mudah ditebak. Menimbang karakter orang Solo, mereka bakal *ngalah*, *ngalih*, dan *ngamuk*. Sejarah lokal telah berulang kali membuktikan premis itu!